



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ā. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ō. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52



RENSTRA

**RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN ,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



<https://dinkes.pesisirs selatan Kab.go.id>



[dinkessessel](#)



[Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan](#)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas segala Rahmad dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator output sebagai Upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Semoga penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi Pembangunan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi Pembangunan khususnya untuk peningkatan angka usia harapan hidup dan derajat kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN, PPKB
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANAI, S.ST., M.M

Nip.19790810 200312 2 006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	9
B A B II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11
2.1 Gambaran Pelayanan	11
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan	43
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN	46
3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN, PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	56
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	56
4.2 Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	62
4.3 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)	114
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan	118
BAB V PENUTUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, menyebutkan pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi seluruh penduduk,

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi Pembangunan Kesehatan yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar Pembangunan Kesehatan terdiri atas perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat, adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama, serta pengutamaan Upaya pendekatan pemeliharaan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari bulir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk Menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Arah kebijakan RPMN Bidang Kesehatan 2025-2045 pada Transformasi sosial adalah penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia yang produktif. Strategi di bidang kesehatan dengan intervensi kunci yang terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa.. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan Kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan Kesehatan jiwa serta disertai investasi pelayanan primer Upaya

promotif dan preventif Kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya Kesehatan.

Di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana arah kebijakan RPJMN bidang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) fokus pada peningkatan kualitas SDM, penurunan stunting, dan pengendalian penduduk menuju keluarga berkualitas. Kebijakan ini menekankan penguatan data keluarga, perluasan akses layanan KB/kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, serta penguatan peran perempuan dan remaja

Poin Utama strategi Kebijakan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana):

- Penguatan Sistem Informasi: Peningkatan kualitas data program berbasis teknologi informasi (smart technology) untuk pengelolaan program.
- Pengendalian Penduduk: Sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pengembangan Garis Besar Data Kependudukan (GDPK).
- Akses Layanan KBKR: Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kewilayahan.
- Ketahanan Keluarga & Stunting: Peningkatan ketahanan keluarga holistik, pembentukan karakter sejak dini, serta optimalisasi pola asuh.
- Program Unggulan (*Quick Wins*):
 - Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
 - Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).
 - Lansia Berdaya (SIDAYA).
 - Platform digital informasi dan konseling (AI-Superapps).
 - Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
- Kelompok Kegiatan (Poktan): Optimalisasi Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down. Hal ini

berarti bahwa perencanaan daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, juga diharapkan munculnya rasa kepemilikan rencana (sense of ownership). Keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan Keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal dalam pengimplementasiannya.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur, khususnya dalam bidang Kesehatan ditandai dengan terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman Kesehatan global, kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap Lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan status Kesehatan dan gizi Masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai wujud tanggung jawab kita saat ini dalam mempersiapkan generasi penerus yang sehat, pintar dan kuat, yang ditandai dengan meningkatnya Umur harapan Hidup (UHH).

Tatanan masyarakat Indonesia dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) berfokus pada pembentukan keluarga berkualitas, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan pemberdayaan melalui program terintegrasi yang didukung BKKBN. Strategi utamanya melibatkan penggerakan kontrasepsi, edukasi pola "dua anak lebih sehat", serta sinergi institusi pusat hingga tingkat desa melalui Kampung KB.

Kesehatan merupakan tanggung jawab komponen bangsa, baik masyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, keluarga, kelompok dan Masyarakat pada umumnya, Upaya Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi, dan lingkungan, dampak globalisasi, situasi morbiditas yang berlandaskan konsep epidemiologi serta kemajuan teknologi. Demikian juga halnya dengan tindakan/perilaku yang berpengaruh pada Kesehatan, untuk itu kebijakan setiap komponen bangsa harus memiliki konsep perilaku yang berwawasan kesehatan, karena setiap tindakan memiliki dampak terhadap Kesehatan. Untuk itu Pembangunan Nasional harus berwawasan Kesehatan, dimana setiap kebijakan publik harus memperhatikan dampak terhadap Kesehatan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
3. Efisien yaitu mencapai keluaran maksimal dengan masukan terendah.
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.
5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra dapat dipertanggungjawabkan.
6. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan.
7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja sebagai salah satu perjanjian kinerja yang harus dilaporkan sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati Pesisir Selatan dan masyarakat Pesisir Selatan. Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan pelaku Pembangunan Kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya. Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan juga menjadi acuan Rumah Sakit UPTD BLUD yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dokumen Renstra BLUD dan RBA tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) OPD disusun berdasarkan pada orientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan di dalam Renstra merupakan proses perencanaan pembangunan berkelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Fasilitasi rancangan akhir Renstra;
- e. Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 161, Tambahan Lembaran Negara NO. 5080;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6806);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
20. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
21. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4 Tahun 2025);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
 35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan Pembangunan Kesehatan jangka Menengah dan Pendek Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Melaksanakan pembagian tugas dan kewenangan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabel.
- c. Menjadi parameter untuk mengukur Tingkat Kinerja Dinas Kesehatan beserta unit pelaksana teknisnya terhadap penyelenggaraan Pembangunan daerah bidang kesehatan.

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
 - 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)
 - 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB V : PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kedudukan

- (1) Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

b. Susunan Organisasi :

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan masyarakat;
 - c. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris.

- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

c. Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana;
- h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Penjabaran tugas dan fungsi masing – masing unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sekretariat

(1) Sekretariat melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang barang milik Daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum Daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkup dinas;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;

- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. pelaksanaan urusan administrasi di lingkup dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
 - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran lingkungan Dinas;
 - b. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan perbendaharaan barang Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dan aset serta penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
 - e. penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Daerah lingkungan Dinas;
 - f. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;
 - i. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
 - j. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
 - k. penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional,

pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/ atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk Daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD lingkup dinas;

- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
 - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
 - g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan, dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
 - j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta

- kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. pemberian bimbingan teknis bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada UPTD lingkup Dinas;
 - m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan

- (1) Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;

- g. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- i. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- j. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- k. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- l. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- m. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- n. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- o. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- p. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

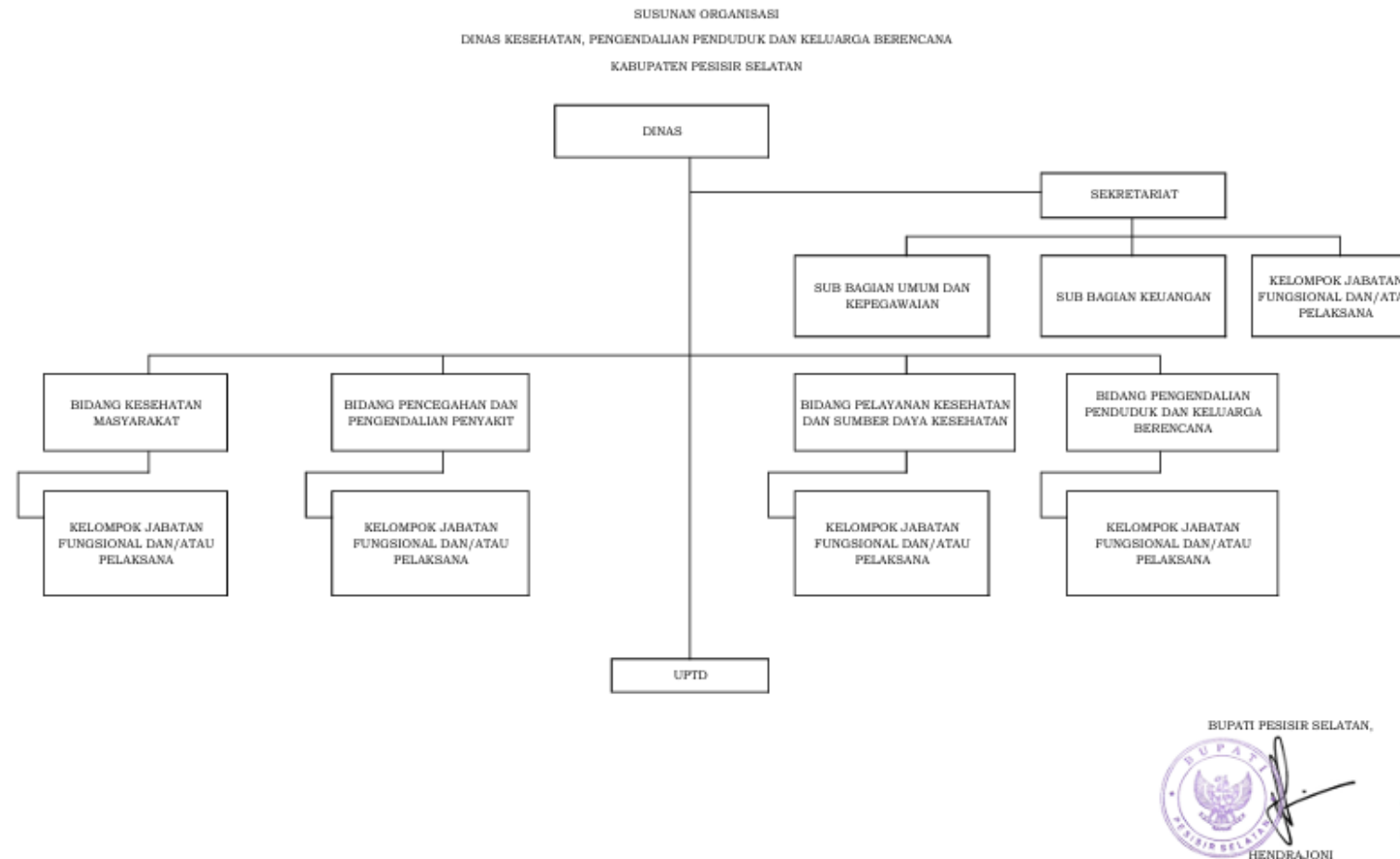
4. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyuluhan dan penggerakkan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga, penyuluhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- m. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana Daerah ;

- n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan seperti gambar 2.1 di bawah ini.

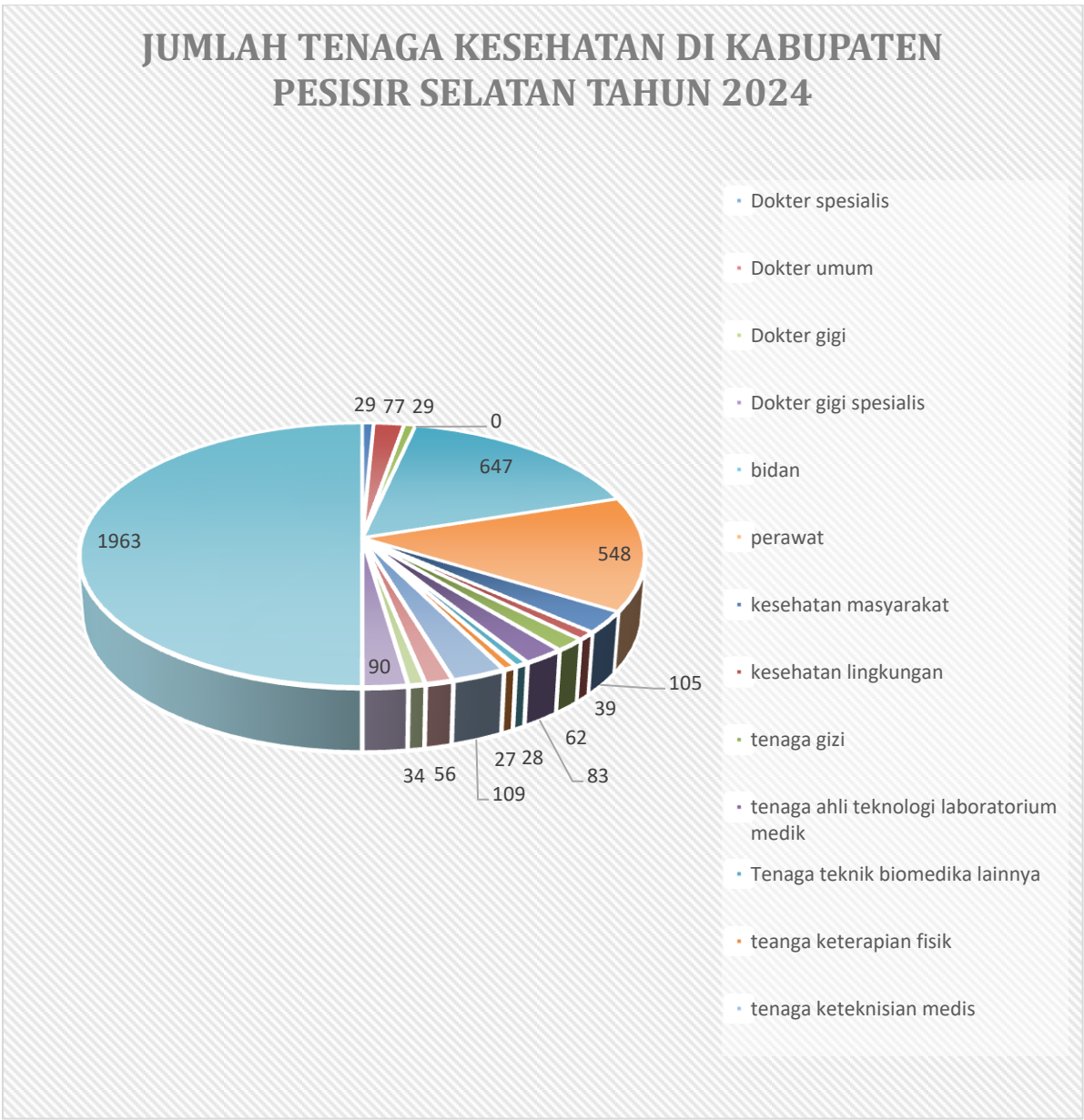


Gambar 2.1 : Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dan 21 (Dua Puluh Satu) UPTD Puskesmas dan RSUD Tapan pada tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :



Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2024

Dari data ketenagaan sumber daya kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh jumlah Tenaga Dokter 106 orang, Dokter Gigi 29 Orang, Bidan 647 orang, Perawat 548. dan ini tersebar di seluruh puskesmas yang ada dan juga termasuk yang ada di Dinas Kesehatan, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan Serta RSUD M. Zein Painan dan RSUD Tapan. Selain itu akan ada penambahan tenaga sebagai tindak lanjut penggabungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dinas kesehatan.

Lampiran IV
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

PETA Jabatan
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jumlah Pegawai per kelas jabatan : 95

Kelas	B	K	+/-													
15	1	1	0													
13	0	0	0													
12	2	3	-1													
11	8	13	-5													
10	0	0	0													
9	14	32	-18													
8	24	50	-26													
7	14	33	-19													
6	21	28	-7													
5	11	24	-13													
Jumlah	95	184	-89													
				Kepala Dinas												
				(kelas 15)	1	1	0									
				Sekretaris Dinas												
				(kelas 12)						1	1	0				
				Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-								
				Perencana Ahli Madya	12	1	2	-1								
				Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	0	1	-1								
				Adminkes Ahli Madya	11	3	3	0								
				Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	1	1	0								
				Nutrisisionis Ahli Madya	11	0	1	-1								
				Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1								
				Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	11	0	1	-1								
				Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	-1								
				Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	0	1	-1								
				Jumlah	5	12	-7									
				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAIAN												
				(kelas 9)				1	1	0						
				Jabatan	Kelas	B	K	+/-								
				Arsiparis Penyelia	8	0	0	0								
				Arsiparis Mahir	7	0	1	-1								
				Arsiparis Terampil	6	1	1	0								
				Arsiparis Ahli Muda	9	0	0	0								
				Arsiparis Ahli Pertama	8	0	0	0								
				Adminkes Ahli Muda	9	1	1	0								
				Adminkes Ahli Pertama	8	1	5	-4								
				Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	0	0								
				Pengolah data dan informasi	6	0	0	0								
				Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	0								
				Penata Layanan Operasional	7	0	2	-2								
				Pengelola Layanan operasional	6	0	0	0								
				Operator layanan Operasional	5	1	5	-4								
				Pengelola Umum Operasional	5	0	1	-1								
				Jumlah	4	16	-12									
				SUB BAGIAN KEUANGAN												
				(Kelas 9)				1	1	0						
				Jabatan	Kelas	B	K	+/-								
				Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0								
				Pengolah data dan informasi	6	2	2	0								
				Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0								
				Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1								
				Pengelola Layanan operasional	6	0	0	0								
				Operator layanan Operasional	5	0	1	-1								
				Jumlah	4	6	-2									
				KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PERENCANA												
				Jabatan	Kelas	B	K	+/-								
				Perencana Ahli Muda	9	1	1	0								
				Perencana Ahli Pertama	8	0	0	0								
				Adminkes Ahli Muda	9	0	0	0								
				Adminkes Ahli Pertama	8	1	1	0								
				Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0								
				Pengolah data dan informasi	6	0	0	0								
				Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	0								
				Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1								
				Pengelola Layanan operasional	6	0	0	0								
				Operator layanan Operasional	5	0	0	0								
				Jumlah	3	4	-1									
				KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PERENCANA												

RENCANA KEBUTUHAN TAHUN 2024

NO	KODE	NAMA	TOTAL EKSISTING			TOTAL KEBUTUHAN
			ASN	PPPK	NON ASN	
1	P1302011102	TANJUNG MAKMUR	23	30	36	97
2	P1302012101	TANJUNG BERINGIN	31	24	46	178
3	P1302020101	TAPAN	21	31	43	138
4	P1302060202	KOTO BARU	42	24	43	150
5	P1302070201	SURANTIH	58	29	115	169
6	P1302080201	PASAR KUOK	30	31	23	126
7	P1302080202	IV KOTO MUDIK	16	28	44	102
8	P1302100103	KOTO BERAPAK	25	26	41	137
9	P1302100201	PASAR BARU	47	23	34	148
10	P1302100202	ASAM KUMBANG	19	32	21	115
11	P1302031201	AIR PURA	19	33	36	138
12	P1302060020	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	35	26	104
13	R1302013	RSUD TAPAN	40	83	223	421
14	D1302	DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN	58	18	35	229
15	P1302030101	INDERAPURA	39	30	37	164
16	P1302070202	KAYU GADANG	28	36	51	197
17	P1302040101	AIR HAJI	62	24	66	203
18	P1302050101	BALAI SELASA	57	30	41	174
19	P1302060101	KAMBANG	69	26	50	176
20	P1302090101	SALIDO	64	22	28	149
21	P1302090202	LUMPO	21	23	26	95
22	P1302110102	TARUSAN	35	39	35	190
23	P1302110201	BARUNG-BARUNG BELANTAI	30	36	23	142
24	R1302011	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	281	110	220	1030

Sumber : Renbut 2024

Dari peta Analisa Jabatan dan Renbut Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024 masih terdapat kekurangan untuk ketenagaannya. Ketenagaan yang dimiliki dan dipergunakan masih belum mendukung pelaksanaan kinerja.

2.1.2.2. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

➤ Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat atau yang disebut Puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat.

Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) Pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan perorangan primer. Pada tahun 2024 jumlah puskesmas di Kabupaten Pesisir selatan sebanyak 21 unit (Puskesmas Rawatan 13 unit dan Puskesmas Non Rawatan 8 unit), Puskesmas Pembantu 89 unit, dan 693 Posyandu.

➤ **Rumah Sakit**

Ruang lingkup Pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan kepemilikan, rumah sakit dikelompokkan menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Pengelompokan ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah, Pemerintah daerah dan Badan Hukum bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas.

Pada tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2 (dua) rumah sakit publik yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein yang berlokasi di Kecamatan IV Jurai dan RSUD Tapan yang berlokasi di Kecamatan Basa IV Balai Tapan. Selain rumah sakit publik, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 2 (dua) rumah sakit privat yang dikelola oleh swasta yaitu Rumah Sakit Umum BKM dan Rumah Sakit Khusus Permata Hati yang keduanya berlokasi di Kecamatan IV Jurai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit telah dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembenahan manajerial rumah sakit sebagai acuan bagi petugas dan pihak manajemen rumah sakit dalam melakukan penataan dan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rekapitulasi Jumlah Alat Puskesmas Kab. Pesisir Selatan 2024								
No	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas	Kelas	Jumlah Alat	AKL	AKD	AKL (%)	AKD (%)
1	13010200001	TANJUNG BERINGIN	Puskesmas Rawat Inap	905	23	454	4,8	95,2
2	13010200002	TANJUNG MAKMUR	Puskesmas Rawat Inap	1083	19	1005	1,9	98,1
3	13010200003	TAPAN	Puskesmas Rawat Inap	487	27	232	10,4	89,6
4	13010200004	INDERAPURA	Puskesmas Rawat Inap	904	36	38	48,6	51,4
5	13010200005	AIR HAJI	Puskesmas Rawat Inap	851	149	320	31,8	68,2
6	13010200006	BALAI SELASA	Puskesmas Rawat Inap	1916	238	1533	13,4	86,6
7	13010200007	KOTO BARU	Puskesmas Non Rawat Inap	523	23	298	7,2	92,8
8	13010200008	KAMBANG	Puskesmas Rawat Inap	1032	18	344	5	95
9	13010200009	SURANTIH	Puskesmas Rawat Inap	2141	13	382	3,3	96,7
10	13010200010	PASAR KUOK	Puskesmas Rawat Inap	593	63	289	17,9	82,1
11	13010200011	IV KOTO MUDIK	Puskesmas Non Rawat Inap	662	194	55	77,9	22,1
12	13010200012	SALIDO	Puskesmas Non Rawat Inap	1190	23	623	3,6	96,4
13	13010200013	LUMPO	Puskesmas Non Rawat Inap	1224	33	42	44	56
14	13010200014	PASAR BARU	Puskesmas Non Rawat Inap	507	14	17	45,2	54,8
15	13010200015	ASAM KUMBANG	Puskesmas Rawat Inap	679	10	82	10,9	89,1
16	13010200016	KOTO BERAPAK	Puskesmas Rawat Inap	801	13	460	2,7	97,3
17	13010200017	TARUSAN	Puskesmas Rawat Inap	1346	11	947	1,1	98,9
18	13010200018	BARUNG-BARUNG BELANTA	Puskesmas Rawat Inap	2001	842	84	90,9	9,1
19	13010200019	ANAH AMPEK HULU TAPAI	Puskesmas Non Rawat Inap	749	293	293	50	50
20	13010200020	AIR PURA	Puskesmas Non Rawat Inap	659	6	445	1,3	98,7
21	13010200021	KAYU GADANG	Puskesmas Non Rawat Inap	311	1	310	0,3	99,7
		TOTAL		20564	2049	8253	472,2	1627,8

Sumber : ASPAK 2024

Rekapitulasi Jumlah Alat Rumah Sakit Kab. Pesisir Selatan 2024								
No	Kode Rumah Sakit	Nama Rumah Sakit	Kelas	Jumlah Alat	AKL	AKD	AKL (%)	AKD (%)
1	1302011	RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	C	1474	685	371	64,9	35,1
2	1302013	RS Umum Daerah Tapan	D Pratama	480	15	242	5,8	94,2
3	1302012	RS Umum BKM	C	687	117	265	30,6	69,4
4	1302015	RS Khusus Ibu dan Anak Permata Hati	Khusus Ibu & Anak C	213	35	178	16,4	83,6
		TOTAL		2854	852	1056	117,7	267,3

Kelengkapan Kepemilikan Puskesmas Apr 2025							
No.	Puskesmas			Kelengkapan			Kumulasi (50S+10P+40A)
				Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
	13010200018	BARUNG-BARUNG BELANTAI	Ranap	100	62,96	77,21	87,18
	13010200009	SURANTIH	Ranap	100	57,41	62,88	80,89
	13010200002	TANJUNG MAKMUR	Ranap	100	53,7	41,83	72,1
	13010200006	BALAI SELASA	Ranap	87,8	46,3	38,05	63,75
	13010200016	KOTO BERAPAK	Ranap	100	50	36,63	69,65
	13010200012	SALIDO	-	100	46,3	33,19	67,91
	13010200005	AIR HAJI	Ranap	100	46,3	32,5	67,63
	13010200001	TANJUNG BERINGIN	Ranap	100	44,44	30,64	66,7
	13010200011	IV KOTO MUDIK	-	100	51,85	27,43	66,16
	13010200010	PASAR KUOK	Ranap	100	42,59	26,39	64,81
	13010200008	KAMBANG	Ranap	100	48,15	24,37	64,56
	13010200013	LUMPO	-	100	40,74	24,34	63,81
	13010200015	ASAM KUMBANG	Ranap	95,12	33,33	22,45	59,87
	13010200003	TAPAN	Ranap	100	57,41	18,79	63,26
	13010200014	PASAR BARU	-	100	48,15	17,99	62,01
	13010200017	TARUSAN	Ranap	100	42,59	16,18	60,73
	13010200007	KOTO BARU	-	41,46	51,85	14,14	31,57
	13010200020	AIR PURA	-	100	55,56	13,45	60,93
	13010200019	RANAH AMPEK HULU TAPAN	-	100	33,33	13,21	58,62
	13010200021	KAYU GADANG	-	100	18,52	12,56	56,88
	13010200004	INDERAPURA	Ranap	100	46,3	11,68	59,3

Kelengkapan Kepemilikan Rumah Sakit Apr 2025									
No.	Rumah Sakit				Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P +30A)	Review Kelas
					Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan		
	1302011	RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	C	Pemkab	76,09	68,18	50,94	66,96	0,63
	1302012	RS Umum BKM	C	Swasta	79,59	100	43,52	72,85	0,59
	1302013	RS Umum Daerah Tapan	D Pratama	Pemkab	52,67	32,56	33,91	43,02	0,52
	1302015	RS Khusus Ibu dan Anak Permata Hati	Khusus Ibu & Anak C	Swasta	17,25	60,98	29,57	29,69	0,38

Sumber : ASPAK 2024

Secara umum kondisi sarana dan prasarana alat kesehatan yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yaitu di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan masih belum mencukupi sesuai standar dari Permenkes.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, PP dan KB

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan.

Pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama dari 4 (Empat) sasaran prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan																			
Kabupaten Pesisir Selatan																			
No	Indikator Kinerja	Target NSPK/ SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Usia Harapan Hidup				70,86	71,11	71,36	71,61	72,11	73,02	73,12	73,2	73,27	73,34	103%	103%	103%	102%	102%
2	Persentase Balita Gizi Buruk				5,51	5,5	5,48	5,46	5,44	5,51	6,4	0,4	0,7	0,9	100%	116%	7%	13%	17%
3	Prevalensi balita gizi kurang				7,29	7,8	7,5	7,3	7	7,29	6,4	3,9	5,6	4,9	100%	82%	52%	77%	70%
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				8/ 1000 KH	8/ 1000 KH	12/ 1000 KH	12/ 1000 KH	11/ 1000 KH	7,47/1.000 KH	7,10/ 1000 KH	9/ 1000 KH	11/ 1000 KH	10/ 1000 KH	180%	162%	152%	159%	167%
5	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup				7,5 1000 KH	7,4/ 1000 KH	7,3/ 1000 KH	7/ 1000 KH	7/ 1000 KH	7,5/ 1000 KH	8/ 1000 KH	10/ 1000 KH	12/ 1000 KH	12,2/ 1000 KH	183%	182%	161%	172%	177%
6	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup				5/ 1000 KH	5,2/ 1000 KH	5/ 1000 KH	5/ 1000 KH	4,78/ 1000 KH	5,48/ 1000 KH	4,6/ 1000 KH	6/ 1000 KH	7,5/ 1000 KH	7,1/ 1000 KH	184%	179%	157%	164%	176%
7	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup				105/ 100.000 KH	100/ 100.000 KH	145/ 100.000 KH	135/ 100.000 KH	130/ 100.000 KH	105/ 100.000 KH	172/ 100.000 KH	144/ 100.000 KH	138/ 100.000 KH	125/ 100.000 KH	137%	109%	104%	98%	86%
8	Rasio posyandu per satuan balita				1 : 53	1:53	1 : 52	1 : 52	1 : 52	1:53	1:64	1:63	1:60	1:83	100%	110%	110%	107%	128%
9	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk				0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,2	0,02	0,04	0,02	0,02	100%	10%	19%	10%	9%
10	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk				0,095	0,0079	0,0079	0,0099	0,0099	0,0079	0,0063	0,0081	0,000766	0,000751	8%	80%	103%	8%	8%
11	Rasio Dokter per satuan penduduk				0,206	0,216	0,226	0,236	0,256	0,095	0,022	0,011	0,09	0,018	46%	10%	5%	38%	7%
12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk				0,206	0,216	0,226	0,236	0,256	0,206	0,028	0,024	0,017	0,018	100%	13%	11%	7%	7%
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				107,13%	80,00%	80,00%	82,00%	82,00%	107,13	128,7	132	108,2	105,13	100,00	160,88	165,00	131,95	128,21
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				89,90%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%	89,9	88,8	91,5	93,1	89,9	100,00	99,78	100,55	100,11	94,63

15	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI)				73,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	73	49	65,9	84,1	88,3	100,00	51,58	69,37	88,53	92,95
16	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				85,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	85	62,6	98	90,1		100,00	65,89	103,16	94,84	-
19	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk				5,01	2	2	2	2	5,01	2,1	6	4,9	9,4	1,00	1,05	3,00	2,45	4,70
20	Cakupan balita pneumonia yang ditangani				52%	100%	100%	100%	100%	52,49%	30,70%	49,00%	59,40%	30,11%	100%	31%	49%	59%	30%
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				14,25	100	100	100	100	14,25	63,8	82	73,7	65	100%	64%	82%	74%	65%
22	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)				157,15	1000	1000	1000	1000	157,15	178	264	269	275	100%	18%	26%	27%	28%
23	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)				3,9	5	5	5	5	3,9	3,9	4,7	5,3	2,9	100%	78%	94%	106%	58%
24	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS				48,64	100	100	100	100	114,6	109,6	103,6	79,9	48,64	236%	110%	104%	80%	49%
25	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS				84%	100%	100%	100%	100%	83,59%	95,1%	90,4%	90,40%	25,91%	100%	95%	90%	90%	26%
26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Penderita diare yang ditangani				85%	100%	100%	100%	100%	84,70%	69,30%	99,00%	21,70%	31,90%	100%	69%	99%	22%	32%
28	Angka kejadian malaria				NA	NA	NA	NA	NA	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
29	Tingkat Kematian akibat malaria				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi				0,00%	<0,51	<0,52	<0,53	<0,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS				100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				85,00%	85	85	85	85	85	85	78	86,16	92,25	100,00	100%	92%	101%	109%

36	Cakupan kunjungan bayi				105,70%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	105,7	87,85	107,6	104,2	105,7	100,00	109,81	134,50	130,25	132,13
37	Cakupan Puskesmas				133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Cakupan Pembantu Puskesmas				43,96%	43,96%	43,96%	43,96%	43,96%	43,96	43,96	54,1	59,7	59,7	100,00	100,00	123,07	135,81	135,81
39	Cakupan kunjungan ibu hamil k4				84,80%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	84,80%	85,30%	88,70%	86,70%	68,60%	100%	100%	99%	94%	72%
40	Cakupan pelayanan nifas				86,20%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	86,20%	78,30%	91,40%	85,60%	86%	100%	92%	102%	93%	91%
41	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani				85,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	50,18%	39%	75,50%	85%	100%	72%	52%	94%	100%
42	Cakupan pelayanan anak balita				72,30%	75,00%	80,00%	82,00%	84,00%	72,30%	77,52%	90,22%	85,60%	99,60%	100%	103%	113%	104%	119%
43	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin				0,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				84,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,20%	93,20%	96,10%	93,30%	96,40%	100%	93%	96%	93%	96%
45	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				85,00%	85,00%	88,00%	90,00%	95,00%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	106%	114%	111%	105%
46	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Persentase PUS yang ber-KB	-	-	-	59,46%	59,87%	60,01%	61,12%	61,47%	76,62%	78,08%	66,00%	67,40%	66,86%	128,86%	130,42%	109,98%	110,27%	108,77%
----	----------------------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Penyajian pada tabel T-C 2.3 di atas merupakan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2020 sampai tahun 2024, Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada tabel diatas, yaitu :

- a. Usia harapan Hidup terjadi peningkatan dari tahun 2020 s/d 2024 yaitu 73,02 pada tahun 2020 dan 73,34 di tahun 2024.

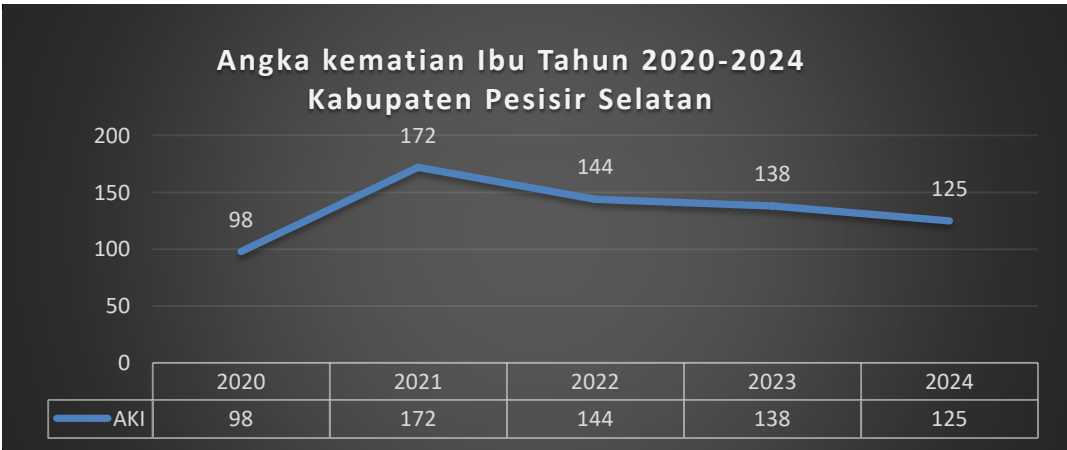
Gambar 2.1



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

- b. Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2020 s/d 2024 terjadi peningkatan kematian ibu di tahun 2021 yaitu 172/100.000 KH dari tahun 2020 dengan angka 98/100.000 KH, namjunn pada tahun 2022 s/d tahun 2024 terjadi penurunan angka kematian ibu yaitu 145/100.000 KH pada tahun 2024 , 138/100.000 KH pada tahun 2023 dan di tahun 2024 Angka Kematian Ibu menjadi 125/100.000 KH.

Gambar 2.2



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

- c. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus dari tahun sebelumnya yaitu 11/1.000 KH pada tahun 2023 menjadi 10/1.000 KH pada tahun 2024 dari 7.536 kelahiran hidup.

Gambar 2.3



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

d. Prevalensi Stunting

Stunting, kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Dalam jangka panjang stunting akan berdampak terhadap potensi kerugian 2-3% dari GDP per tahun (World Bank, 2016) sebagai akibat menurunnya produktivitas. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Perhitungan data stunting dilakukan melalui dua metode Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan riset kesehatan berbasis komunitas berskala nasional dan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5-6 tahun sekali. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans gizi, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu, maka pemantauan dan pelaporan status gizi individu telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Data pencapaian prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM memiliki kecenderungan penurunan selama 3 tahun terakhir. Gambar 2.4 menunjukkan data stunting EPPGM menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 11,8 %, pada tahun 2021

naik 12,3 % , kemudian tahun 2022 turun lagi 7%. Angka di tahun 2023 tetap 7 % dan tahun 2024 turun menjadi 6,65%

Gambar 2.4



Sumber: data Profil Dinas Kesehatan 2024

TABEL T.C-24																		
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan																		
Kabupaten Pesisir Selatan																		
TAHUN 2020-2024																		
URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Persentase
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)
DINAS KESEHATAN	178.623.069.055	194.686.857.929	160.948.946.853	174.415.225.802	222.697.394.444	162.127.179.179	164.746.032.886	142.992.548.393	160.141.499.273	204.977.800.122	90,76	84,62	88,84	91,82	92,04	931.371.494.083	834.985.059.853	89,65

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (Rp. 000)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.418.840	6.280.734	5.987.849	6.135.316	6.848.292	3.428.376	3.460.163	3.980.781	5.471.513	6.116.687	63,27%	55,09%	66,48%	89,18%	89,32%	6.134.206	4.491.504

e. **CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka peyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/ Kota mencakup 12 (dua belas), jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan. Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10T yaitu : Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu : Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan

yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0- 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6- 48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

4. Pelayanan kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/ DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Setiap anak pada usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Setiap warga Negara Indonesia usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Melitus dan Gagal Ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- b. Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara.

11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan sdi wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP 9 puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika. Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2020-2024 mencakup 12 jenis pelayanan dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Pencapaian	Target	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	84,75	85,32	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	86,78	85,76	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang pendapatkan layanan kesehatan	100%	99,4	79,51	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Juimlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	72,26	79,51	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	84,21	18,18	100	100	87
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	21,18	24,51	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia Lanjut dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	70,75	52	100	100	82
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	24,52	10,82	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes meletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes meletus yang pendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	87,67	56,65	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	97,67	92,15	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang yang terduga turbekolosis	Jumlah Warga Negara orang yang terduga turbekolosis yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	121,7	63,84	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Humam immuno deficiency Virus)	Jumlah Warga Negara orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Humam munodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	24,7	72,67	100	100	100

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan bidang kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta keluarga berencana didasarkan pada 2 kelompok yaitu berdasarkan siklus hidup dan berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk kelompok siklus hidup dimulai dari bayi baru lahir, Balita, usia pra sekolah, usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lansia. Berdasarkan kondisi terdiri dari Ibu Hamil, Ibu Beralin, Penderitra Diabetes, Hipertensi, ODGJ,

TBc dan HIV. Untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah Kelompok Pasangan Usia Subur dan Remaja.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Permasalahan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kematian ibu/maternal dan kematian bayi/neonatal yang berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat
2. Masih adanya balita dengan status gizi kurang dan stunting.
3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
4. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
7. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat berbasis individu, keluarga risti dan kelompok masyarakat resiko tinggi terhadap masalah kesehatan.
9. Masih rendahnya pemenuhan Ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber-KB.
10. Masih Tingginya Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19 Tahun)
11. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.
12. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
13. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan kurang memenuhi standard.
14. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
15. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
16. Sarana, Prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang belum memadai
17. Belum maksimalnya kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.
18. RSUD Tapan dan puskesmas kayu gadang belum melaksanakan PPK BLUD

19. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis di RSUD M Zein dan RSUD Tapan
20. Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia belum sinkron dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada di RSUD
21. Keterbatasan anggaran dalam menunjang operasional rumah sakit yang dapat menghambat pemeliharaan infrastruktur, pembelian peralatan medis, pelatihan SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan, pembayaran obat BMHP dan lain-lain

2.2.2. Isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari gambaran pelayanan Dinkes PP & KB, dan isu yang berkembang saat ini, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan yang menjadi perhatian Dinkes Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Isu strategis yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (AKI)

Meskipun ada penurunan, angka kematian ibu masih cukup tinggi, mencerminkan tantangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan ibu.

2. Masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita.

Masih tingginya angka kematian bayi dan balita, yang menunjukkan potensi masalah dalam kualitas perawatan kesehatan maternal dan anak. Masih ditemuinya balita gizi buruk dan gizi kurang serta stunting

3. Angka Kematian Neonatal.

Angka kematian neonatal yang tidak menunjukkan penurunan signifikan dapat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perawatan neonatal.

4. Prevalensi Gizi buruk

Terdapat konsistensi dalam tingginya persentase balita yang mengalami gizi buruk, yang menunjukkan masalah dalam program gizi dan akses pangan yang memadai.

5. Rasio Tenaga Kesehatan yang Rendah.

Rasio dokter dan tenaga medis per penduduk yang rendah dapat menghambat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

6. Cakupan Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata.

Beberapa cakupan pelayanan kesehatan seperti pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan kunjungan kesehatan ibu masih di bawah target, yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

7. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Rasio puskesmas dan rumah sakit per penduduk yang rendah dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan

8. Cakupan Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata

9. Keterbatasan pada Program Imunisasi.

Beberapa tahun belakangan menunjukkan cakupan imunisasi yang tidak optimal, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit.

10. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan secara optimal, termasuk penyediaan puskesmas pembantu pada setiap nagari

11. Masih tingginya prevalensi penyakit tidak menular dan penyakit menular

Tingkat prevalensi tuberkulosis yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam deteksi, pengobatan, dan pencegahan penyakit menular

12. Belum terlaksananya Mutu Pelayanan Kesehatan secara optimal & berkesinambungan di Fasyankes.

13. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan

Tingginya jumlah penyakit yang berbasis lingkungan menunjukkan masyarakat kurang peduli dengan kesehatan lingkungan

14. Masih tingginya resiko dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat

Sering terjadinya bencana alam di kabupaten pesisir selatan yang dapat menyebarkan penyakit sehingga memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat .

15. Perencanaan dan monitoring evaluasi bidang kesehatan melalui beberapa mekanisme sehingga belum efektif.

16. Keterbatasan anggaran dalam menunjang operasional rumah sakit yang dapat menghambat pemeliharaan infrastruktur, pembelian peralatan medis, pelatihan SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan, pembayaran obat BMHP dan lain-lain

17. Masih rendahnya kepesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi;

18. Masih rendahnya Keluarga Sejahtera;

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

3.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan Tujuan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah berdasarkan kepada Visi dan Misi RPJMD. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"

Visi ini mencerminkan tekad pemerintah daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun Penjelasan visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan

masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik dijalankan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penguatan sistem birokrasi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, misi ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan menjadi pendorong utama keberhasilan pembangunan daerah.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama bagi kemajuan daerah. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar strategis dalam membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Melalui sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, mendorong pengembangan karakter, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, melalui sektor kesehatan, upaya difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, penurunan angka

kematian ibu dan anak, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif dan inklusif. Dengan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, daerah berupaya menciptakan SDM yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Perwujudan misi ini merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan

harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. **Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana**

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi daerah yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka Dinas Kesehatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat “.

3.1.2 **Sasaran**

Sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Rangkaian tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang menggambarkan kinerja struktural dari OPD Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN											
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,343	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5	
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup) (Angka)	125	111	97	97	83	83	82	
			Prevalensi Stunting (%)	27	24	23	22	21	20	20	
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (Treatment Coverage) (%)	57	95	95	95	95	95	95	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	92,25	93	94	95	96	97	98	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Angka)	80,81	81	81	82	82	8384	80,4	
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	91	91	91	91	91	91	100	
Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga;	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	Meningkatnya Keluarga yang berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	61,47%	62,14%	62,89%	63,00%	63,15%	63,30%	63,45%	

Berdasarkan uraian Tabel 3.1, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat.

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan dalam Renstra, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terarah, terpadu, dan berorientasi pada hasil. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman teknis dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang lebih operasional. Penyusunan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra ini disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta memperhatikan kondisi riil daerah, potensi unggulan, isu strategis, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Setiap tujuan pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, lalu dirinci dalam strategi dan arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) secara tahunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan pembangunan dalam periode Renstra dapat berjalan lebih terfokus, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Berikut startegi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi

Tabel 3,2
Strategi Dan Arah Kebijakan pada Tujuan Dan Sasaran Menurut Misi

Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan									
			Tahun I (2026)		Tahun II (2027)		Tahun III (2028)		Tahun IV (2029)		Tahun V (2030)	
Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas												
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing												
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat												
Sasaran 1.												
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan		Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	
Sasaran 2												
Meningkat Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Penguatan Kualitas Inovasi Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	
Sasaran 3												
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1	Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan	1	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	1	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	1	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	1	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan	1	Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan
	2	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan	2	Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran	2	Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran	2	Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran	2	Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran	2	Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran

	3	Peningkatan gizi dan pencegahan penyakit	3	Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan	3	Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan	3	Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan	3	Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan	3	Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan
	4	Penguatan sistem kesehatan masyarakat dan ketahanan kesehatan	4	Pembentukan Pustu di setiap nagari	4	Pembentukan Pustu di setiap nagari	4	Pembentukan Pustu di setiap nagari	4	Pembentukan Pustu di setiap nagari	4	Pembentukan Pustu di setiap nagari
	5	Perubahan perilaku hidup sehat berbasis masyarakat	5	Kampanye gaya hidup sehat	5	Kampanye gaya hidup sehat	5	Kampanye gaya hidup sehat	5	Kampanye gaya hidup sehat	5	Kampanye gaya hidup sehat
	6	Peningkatan pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat	6	Pencegahan stunting	6	Pencegahan stunting	6	Pencegahan stunting	6	Pencegahan stunting	6	Pencegahan stunting
	7	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia	7	Peningkatan cakupan layanan KIA	7	Peningkatan cakupan layanan KIA	7	Peningkatan cakupan layanan KIA	7	Peningkatan cakupan layanan KIA	7	Peningkatan cakupan layanan KIA
			8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	8	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
			9	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	9	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	9	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	9	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi	9	Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi

			10	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	10	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	10	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	10	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan	10	Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan
			11	Peningkatan Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi	11	Peningkatan Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi	11	Peningkatan Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi	11	Peningkatan Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi	11	Peningkatan Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi
			12	Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.	12	Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.	12	Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.	12	Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.	12	Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.
			13	Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber daya Kesehatan (SDK)	13	Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber daya Kesehatan (SDK)	13	Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber daya Kesehatan (SDK)	13	Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber daya Kesehatan (SDK)	13	Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber daya Kesehatan (SDK)
			14	Pemenuhan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	14	Pemenuhan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	14	Pemenuhan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	14	Pemenuhan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	14	Pemenuhan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
			15	Mewujudkan Lingkungan Sehat	15	Mewujudkan Lingkungan Sehat	15	Mewujudkan Lingkungan Sehat	15	Mewujudkan Lingkungan Sehat	15	Mewujudkan Lingkungan Sehat

Sasaran 4												
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	1	Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	1	Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi	1	Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi	1	Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi	1	Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi 1.	1	Pemenuhan Ketersedian Alat Kontrasepsi
	2	Meningkatkan Pelayanan KB	1	Membangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan MKJP	1	Membangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan MKJP	1	Membangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan MKJP	1	Membangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan MKJP	1	Membangun Kerja Sama dalam Peningkatan Pelayanan MKJP
	3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB	1	Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan sarpras Balai Penyuluh KB	1	Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan sarpras Balai Penyuluh KB	1	Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan sarpras Balai Penyuluh KB	1	Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan sarpras Balai Penyuluh KB	1	Pemenuhan Kebutuhan Operasional dan sarpras Balai Penyuluh KB KB
	4	Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan KB	1	Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB	1	Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB	1	Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB	1	Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB	1	Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN, PEGENDALIAN PENDUDUK

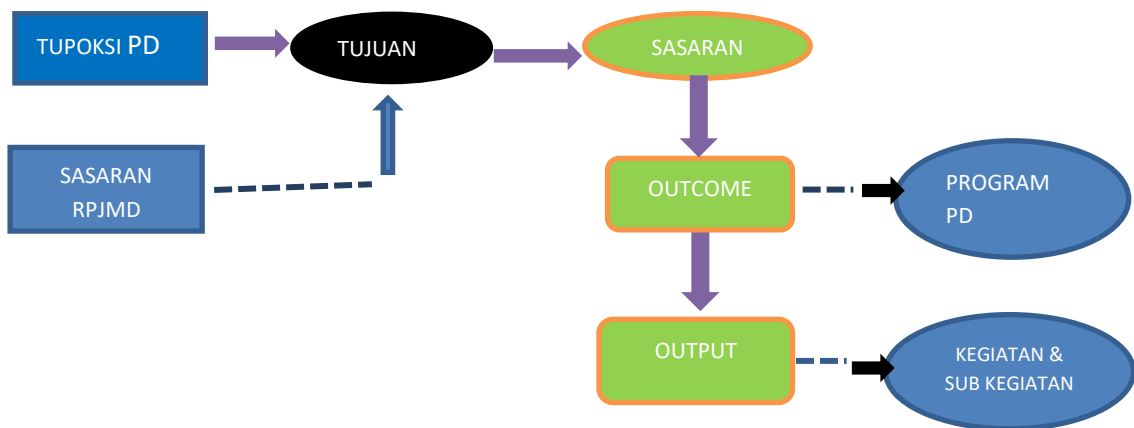
DAN KELUARGA BERENCANA

Melalui pendekatan kinerja, Pemerintah daerah focus pada kinerja terukur dari aktifitas dan program kerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah daerah daral melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, bvalidasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, menjelaskan bahwa program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah dara Lampiran I tentang matrik pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktifitas ekgaitan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Kesehatan , PP&KB



Sesuai dengan Permendagri nomor : 90 Tahun 2019, **urusan Kesehatan serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menggunakan 9 Program** dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan :

**TABEL 4.1 PROGRAM DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					292.049.548.956		277.736.122.903		277.590.663.985		283.068.033.372		299.071.371.116	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					196.251.607.261		207.344.827.962		208.187.165.481		210.214.817.950		225.004.707.803	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,81	81	81	196.251.607.261	82	207.344.827.962	82	208.187.165.481	83	210.214.817.950	84	225.004.707.803	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	91	91	91		91		91		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
												Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					94.029.931.579		68.538.051.718		67.461.050.006		70.816.507.941		71.931.287.861	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	20	30	94.029.931.579	40	68.538.051.718	50	67.461.050.006	65	70.816.507.941	75	71.931.287.861	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (%)	20	22	23		24		28		30		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	83	84	85		86		87		88		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	60	63	65		68		72		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,4	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan penemuan kasus TB (Angka)	1.368	2.379	2.050		1.774		1.578		1.429		1.315		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	65,4	64	66		68		70		72		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	45	45	45		45		55		55		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	76	78	80		82		84		86		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.340.709.220		1.407.744.682		1.478.131.916		1.552.038.512		1.629.640.436	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya (%)	60	65	70	1.340.709.220	75	1.407.744.682	80	1.478.131.916	85	1.552.038.512	90	1.629.640.436	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	12	17	22		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	5,2	5,3	5,3		5,4		5,4		5,5		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)	63	67	71		76		81		86		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					85.498.199		89.773.109		94.261.765		98.974.853		103.923.595	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Parsentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	40	45	50	85.498.199	55	89.773.109	60	94.261.765	65	98.974.853	75	103.923.595	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	25	30	35		40		45		60		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	50	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	10	12	15		20		25		30		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					341.802.697		355.725.432		370.054.817		385.694.116		401.811.421	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Parsentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	17,63	40	45	341.802.697	50	355.725.432	65	370.054.817	70	385.694.116	75	401.811.421	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL URUSAN KESEHATAN					292.049.548.956		277.736.122.903		277.590.663.985		283.068.033.372		299.071.371.116	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	2,48	2,46	2,44	300.000.000	2,42	300.000.000	2,4	300.000.000	2,39	300.000.000	2,37	300.000.000	Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	10,4	9,9	9,4		9,1		8,8		8,6		8,4		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	59,49	60,9	62,2		63,5		64,7		65,9		67		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) (%)	66,86	66,88	66,9	6.067.097.000	66,92	6.067.097.000	66,94	6.067.097.000	66,96	6.067.097.000	66,98	6.067.097.000	Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	33,79	33,77	33,75		33,73		33,71		33,69		33,67		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	20 25	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modren (%)	83,9	85	86,1		87,1		88,1		88,9		89,7		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (%)	40,16	40,27	40,31		41,23		41,76		42,03		42,68		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan (%)	94,2	94,7	95,1		95,3		95,9		96,3		96,6		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting (%)	97,98	98,17	98,24		98,82		98,97		99,01		99,31		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	97,3	97,7	98		98,5		100		100		100		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	45,25	45,5	45,75	2.483.600.000	50	2.483.600.000	50,25	2.483.600.000	50,5	2.483.600.000	50,75	2.483.600.000	Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Angka)	59,5	60,3	61		61,7		62,4		63		63,7		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (Indeks)	80,1	81,8	83,4		84,8		86,1		87,2		88,3		Dinas yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.850.697.000		8.850.697.000		8.850.697.000		8.850.697.000		8.850.697.000	
TOTAL KESELURUHAN					300.900.245.956		286.586.819.903		286.441.360.985		291.918.730.372		307.922.068.116	

4.2 Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Dalam mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, maka disusunlah program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing (Nilai SAKIP, Indeks SPBE)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat				Indeks Kesehatan Keluarga (IKS)		
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat (Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029		1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat			1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting 3.Persentase Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis 4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
			1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kewenangan Daerah	untuk UKM dan UKM Kewenangan Daerah kabupaten/kota yang representatis	UKP dan UKM Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	
						pembangunan Rumah sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
						Pembangunan Puskesmas	
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						Pengembangan Rumah Sakit	
						Pengembangan Puskesmas	
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan rumah Sakit	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga	
						Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, pelayanan kesehatan berdasarkan Telemedicine)	
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengelolaan pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik melalui sistem rujukan terintegrasi (SISROUTE)	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupunktur, Asuhan mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
						Operasional Pelayanan Puskesmas	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya penerbitan Izin RS kelas C,D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya penerbitan izin RS Kelas C,D dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tk Daerah kabupaten/Kota	Penerbitan Izin RS Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TK Daerah Kab/Kota	
						Pengendalian dan Pengawasan Tindak lanjut pengawasan perizinan rumah Sakit kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.	
						Pengelolaan tata kelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat seuai siklus hidup sehat masyarakat		1. Tercapainya standar pelayanan kesehatan minimal bagi semua siklus hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					2. Persentase standar pelayanan minimal bagi semua siklus hidup.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan PSM dan lintas Sektor Tk Daerah kab/kota	Tercapainya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan PSM dan lintas Sektor Tk Daerah kab/kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan PSM dan Lintas Sektor TK Daerah Kab/Kota	
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif TK daerah kab/kota	Tercapainya pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tk daerah kab/kota	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tk daerah kab/kota	
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
						Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	
						Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.	
				Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya kesehatan masyarakat (UKBM)	Tercapainya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya kesehatan masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tk daerah kab/kota	
						Bimbingan Teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan berseumber daya kesehatan masyarakat (UKBM)	
			Meningkatnya Kualitas dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDK)		Persentase Puskesmas yang memiliki SDK sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah rumah Sakit yang memiliki SDK Sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Darah kabupaten/Kota	
						Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	
						Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya.	
				Terlaksananya Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehtan dan optikal, usaha mikro, obat tradisional (Umot)	Persentase rekomendasi izin apotik, toko obat toko alat kesehatan dan optikal, usha mikro, obat Tradisional (UMOT)	Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehtan dan optikal, usaha mikro, obat tradisional (Umot)	
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
						Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perbekalan rumah tangga	Persentase Pemberian rekomendasi izin produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perbekalan rumah tangga	Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perbekalan rumah tangga	
						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri rumah tangga	Presentase Penerbitan rekomendasi izin produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri rumah tangga	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri rumah tangga	
						Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh IRT	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dadn produk makanan dan minuman IRT	Persentaer Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman IRT	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dadn produk makanan dan minuman IRT	
						Pemeriksaan post market pada produk makanan dan minuman IRT yang beredar dan pengawasan serta pengawasan	
				Terlaksananya Pemberian izin praktik kepada tenaga tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	jumlah tenaga kesehatan yang diberi izin praktek di wilayah kabupaten/kota	Pemberian izin praktik tenaga tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	
						Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	
						Pembinaan dan pengawasan tenaga tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	
				Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan TK Daerah Kab/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan TK Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan TK Daerah Kab/Kota	
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	
						Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TK Daerah Kab/Kota	
			Menurunnya Prevalensi Penyakit		Prevalensi Penyakit Menular	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Prevalensi Penyakit Tidak Menular		
					Cakupan Imunisasi Dasar (IDL)		
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberkulosis	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Deteksi Dini penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.	
						Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	
						Pengelolaan Kesehatan orang dengan HIV (odhiv)	
						Pelayanan Kesehatan Malaria	
						Pengelolaan Layanan Imunisasi.	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji.	
						Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat DaerahIK			Nilai AKIP Dinas Kesehatan		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Dinas Kesehatan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase kinerja bidang yang tercapai	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk		TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

Tabel. 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				292.049.548.956		277.736.122.903		277.590.663.985		283.068.033.372		299.071.371.116			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				196.251.607.261		207.344.827.962		208.187.165.481		210.214.817.950		225.004.707.803			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,81	81	196.251.607.261	82	207.344.827.962	82	208.187.165.481	83	210.214.817.950	84	225.004.707.803	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN		
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	91	91		91		91		91		100				
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.159.000		254.250.000		261.522.000		270.105.000		279.007.000			
Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21	21	252.159.000	21	254.250.000	21	261.522.000	21	270.105.000	21	279.007.000			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12				12				12				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	91				92				93			94	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	10				10				10			10	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	91				92				93			94	
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		70.000.000		70.662.000		72.245.000		76.007.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21	21	60.000.000	21	70.000.000	21	70.662.000	21	72.245.000	21	76.007.000			
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		250.000		500.000		1.500.000		1.500.000			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	91	3.000.000	92	250.000	93	500.000	94	1.500.000	94	1.500.000			
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.000.000		0		500.000		1.500.000		1.500.000			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	91	6.000.000	92	0	93	500.000	94	1.500.000	94	1.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				55.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	10	55.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				128.159.000		129.000.000		129.860.000		129.860.000		130.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	128.159.000	12	129.000.000	12	129.860.000	12	129.860.000	12	130.000.000		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				159.807.296.000		169.827.731.000		169.849.188.000		170.871.717.000		184.482.746.004		
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	159.807.296.000	12	169.827.731.000	12	169.849.188.000	12	170.871.717.000	12	184.482.746.004		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	21	21				21				21			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12				12				12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	928	1.280				1.280				1.290			1.300
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				159.398.597.000		169.398.597.000		169.398.597.000		170.398.597.000		183.985.970.004		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	928	1.280	159.398.597.000	1.280	169.398.597.000	1.290	169.398.597.000	1.300	170.398.597.000	1.320	183.985.970.004		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				329.555.000		346.033.000		363.334.000		381.501.000		400.576.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	21	21	329.555.000	21	346.033.000	21	363.334.000	21	381.501.000	21	400.576.000		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				76.144.000		80.101.000		84.257.000		90.619.000		95.200.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	76.144.000	12	80.101.000	12	84.257.000	12	90.619.000	12	95.200.000		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				164.917.000		258.987.000		263.260.000		277.746.000		282.457.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase barang milik daerah yang diamankan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	164.917.000	12	258.987.000	12	263.260.000	12	277.746.000	12	282.457.000		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	24		24		30		36		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	24		24		30		36		40			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	24		24		30		36		40			
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				500.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	24	500.000	24	1.000.000	30	1.500.000	36	1.500.000	40	1.500.000		
1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.391.000		183.461.000		186.734.000		191.220.000		195.931.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	24	100.391.000	24	183.461.000	30	186.734.000	36	191.220.000	40	195.931.000		
1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	24	500.000	24	1.000.000	30	1.500.000	36	1.500.000	40	1.500.000		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				63.526.000		73.526.000		73.526.000		83.526.000		83.526.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	63.526.000	12	73.526.000	12	73.526.000	12	83.526.000	12	83.526.000		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				173.684.000		191.368.000		199.436.000		207.908.000		216.804.000		
Persentase kelengkapan data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	173.684.000	20	191.368.000	20	199.436.000	20	207.908.000	20	216.804.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20	20		20		20		20		20			
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		3.000.000		3.000.000		2.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20	20	5.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	2.000.000	20	1.000.000		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				65.450.000		77.723.000		80.109.000		82.614.000		85.245.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	21	21	65.450.000	21	77.723.000	21	80.109.000	21	82.614.000	21	85.245.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				103.234.000		110.645.000		116.327.000		123.294.000		130.559.000				
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	103.234.000	20	110.645.000	20	116.327.000	20	123.294.000	20	130.559.000				
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				587.450.000		602.533.000		629.298.000		651.081.000		678.339.000				
Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	587.450.000	1	602.533.000	1	629.298.000	1	651.081.000	1	678.339.000				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	21	21				21				21					21
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12				12				12					12
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	20				20				24					24
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12				12				12					12
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12				12				12					12
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1				1					1
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10				10				15					15
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12				12				15					15
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.357.000		32.975.000		33.624.000		34.305.000		35.021.000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10	29.357.000	10	32.975.000	15	33.624.000	15	34.305.000	15	35.021.000				
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	85.000.000	12	85.000.000	15	95.000.000	15	100.000.000	15	105.000.000				
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.204.000		43.264.000		45.427.000		47.699.000		50.084.000				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	41.204.000	1	43.264.000	1	45.427.000	1	47.699.000	1	50.084.000				
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.001.000		26.251.000		27.563.000		28.941.000		30.388.000				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.001.000	1	26.251.000	1	27.563.000	1	28.941.000	1	30.388.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	21	21	5.400.000	21	5.400.000	21	5.400.000	21	5.400.000	21	5.400.000		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.525.000		34.151.000		35.858.000		37.651.000		39.534.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	32.525.000	12	34.151.000	12	35.858.000	12	37.651.000	12	39.534.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				285.685.000		285.800.000		290.250.000		290.350.000		293.540.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	285.685.000	12	285.800.000	12	290.250.000	12	290.350.000	12	293.540.000		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				48.278.000		49.692.000		51.176.000		56.735.000		64.372.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	20	48.278.000	20	49.692.000	24	51.176.000	24	56.735.000	24	64.372.000		
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				296.464.000		761.037.000		307.238.000		321.100.000		345.655.000		
Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	21	296.464.000	21	761.037.000	21	307.238.000	21	321.100.000	21	345.655.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3		3		4		2		3			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		4									
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				1									
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		430.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0	1	430.000.000		0		0		0		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.000.000		47.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	45.000.000	3	47.000.000	4	30.000.000	2	30.000.000	3	40.000.000		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				248.464.000		260.887.000		273.931.000		287.628.000		302.009.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	21	248.464.000	21	260.887.000	21	273.931.000	21	287.628.000	21	302.009.000		
1.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.150.000		3.307.000		3.472.000		3.646.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	21	3.000.000	21	3.150.000	21	3.307.000	21	3.472.000	21	3.646.000					
1.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		20.000.000		0		0		0					
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	4	20.000.000		0		0		0					
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.357.000		542.776.000		560.465.000		588.487.000		617.912.000					
Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			528.357.000		542.776.000		560.465.000		588.487.000		617.912.000					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12						
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				268.989.000		270.439.000		274.511.000		288.236.000		302.648.000					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	268.989.000	12	270.439.000	12	274.511.000	12	288.236.000	12	302.648.000					
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0					
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0					
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				259.368.000		272.337.000		285.954.000		300.251.000		315.264.000					
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	259.368.000	12	272.337.000	12	285.954.000	12	300.251.000	12	315.264.000					
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.587.548.000		964.815.000		993.796.000		954.527.000		1.024.043.000					
Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	21	1.587.548.000	21	964.815.000	21	993.796.000	21	954.527.000	21	1.024.043.000					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1				1				1						
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)																
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	25				25				28			30		28	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	50				55				68			78		80	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3				3				3			3		3	
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000		39.190.000		39.190.000		39.190.000		39.190.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				440.358.000		452.375.000		464.994.000		478.244.000		492.156.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	25	440.358.000	25	452.375.000	28	464.994.000	30	478.244.000	28	492.156.000		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		76.000.000		80.000.000		85.000.000		88.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	50	63.000.000	55	76.000.000	68	80.000.000	78	85.000.000	80	88.000.000		
1.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				45.000.000		47.250.000		49.612.000		52.093.000		54.697.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	21	45.000.000	21	47.250.000	21	49.612.000	21	52.093.000	21	54.697.000		
1.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		350.000.000		360.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	1.000.000.000	3	350.000.000	3	360.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000		
1.02.01.2.13 - Penataan Organisasi				62.927.000		64.573.000		66.302.000		68.117.000		70.023.000		
output 1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	21	21	62.927.000	21	64.573.000	21	66.302.000	21	68.117.000	21	70.023.000		
1.02.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				62.927.000		64.573.000		66.302.000		68.117.000		70.023.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	21	21	62.927.000	21	64.573.000	21	66.302.000	21	68.117.000	21	70.023.000		

1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				94.029.931.579		68.538.051.718		67.461.050.006		70.816.507.941		71.931.287.861						
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	20	30	94.029.931.579	40	68.538.051.718	50	67.461.050.006	65	70.816.507.941	75	71.931.287.861	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN					
	Prevalensi Depresi pada usia > 15 tahun (%)	20	23												24	28	30	32
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	23,4	23,4												23,4	23,4	23,4	23,4
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	83	85												86	87	88	89
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	60	65												68	72	75	80
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	100	100												100	100	100	100
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,4	11,4												10,4	9,4	8,4	7,4
	Cakupan penemuan kasus TB (Angka)	1.368	2.050												1.774	1.578	1.429	1.315
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	65,4	66												68	70	72	74
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)			(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	45	45		45		55		55		55							
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	76	80		82		84		86		88							
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				39.687.924.732		14.293.070.969		13.200.974.517		15.614.148.243		15.920.105.655						
Persentase faskees yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	21	4	39.687.924.732	2	14.293.070.969	1	13.200.974.517	1	15.614.148.243	0	15.920.105.655						
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1		0		0		0		0							
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1															
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		65															
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	125		130		130		150		165							
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	21	21		21		21		21		21							
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (keluarga)	100	100		100		100		100		100							
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)																	
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	21	0		0		0		1		1							
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	64	1		1		0		0		0							
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)																	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		5		2		5		3		5			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	55												
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	4	4		1		1		1		0			
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0		0		0		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	21	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5.000.000.000		0		0		0		0		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0	1	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				1.000.000.000		1.000.000.000		0		0		0		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	64	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				3.000.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		0		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	21	4	3.000.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.500.000.000		500.000.000		500.000.000		450.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	21	21	1.500.000.000	21	500.000.000	21	500.000.000	21	450.000.000	21	400.000.000		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				5.000.000.000		400.000.000		300.000.000		300.000.000		0		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	4	4	5.000.000.000	1	400.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		55	3.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				2.500.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		5	2.500.000.000	2	200.000.000	5	150.000.000	3	150.000.000	5	100.000.000		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		65	5.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				285.685.000		300.000.000		350.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	100	125	285.685.000	130	300.000.000	130	350.000.000	150	300.000.000	165	300.000.000		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				13.214.315.000		10.000.000.000		10.000.000.000		11.505.000.000		12.400.000.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	13.214.315.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	11.505.000.000	2	12.400.000.000		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				85.000.000		85.000.000		87.500.000		90.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	87.500.000	100	90.000.000	100	95.000.000		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				102.924.732		108.070.969		113.474.517		119.148.243		125.105.655		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	102.924.732		108.070.969		113.474.517		119.148.243		125.105.655		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				39.626.897.593		39.127.556.998		39.313.565.366		39.521.645.144		39.734.014.836		
Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
output 1	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.114	1.134	39.626.897.593	1.134	39.127.556.998	1.134	39.313.565.366	1.134	39.521.645.144	1.134	39.734.014.836		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	77.425	77.435		77.435		77.435		77.435		77.435			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55.445	55.445		55.445		55.445		55.445		55.445			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.076	10.086		10.086		10.086		10.086		10.086			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.655	10.655		10.655		10.655		10.655		10.655			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.751	10.761		10.761		10.761		10.761		10.761			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12.708	12.608		12.608		12.608		12.608		12.608			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11.561	11.571		11.571		11.571		11.571		11.571			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.084	1.125		1.125		1.125		1.125		1.125			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.809	50.819		50.819		50.819		50.819		50.819			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65.185	65.195		65.195		65.195		65.195		65.195			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33.840	33.850		33.850		33.850		33.850		33.850			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				150.244.200		157.756.410		165.644.231		173.926.442		182.622.764		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.751	10.761	150.244.200	10.761	157.756.410	10.761	165.644.231	10.761	173.926.442	10.761	182.622.764		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				213.198.540		223.858.467		235.051.390		246.803.960		259.144.158		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.655	10.655	213.198.540	10.655	223.858.467	10.655	235.051.390	10.655	246.803.960	10.655	259.144.158		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				18.559.885		19.487.879		20.462.273		21.485.387		22.559.656		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.076	10.086	18.559.885	10.086	19.487.879	10.086	20.462.273	10.086	21.485.387	10.086	22.559.656		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				49.007.100		51.457.455		54.030.328		56.731.844		59.568.436		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55.445	55.445	49.007.100	55.445	51.457.455	55.445	54.030.328	55.445	56.731.844	55.445	59.568.436		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				36.797.750		38.637.638		40.569.519		42.597.995		44.727.895		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	77.425	77.435	36.797.750	77.435	38.637.638	77.435	40.569.519	77.435	42.597.995	77.435	44.727.895		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				115.951.950		121.749.548		121.749.548		134.228.876		140.940.320		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33.840	33.850	115.951.950	33.850	121.749.548	33.850	121.749.548	33.850	134.228.876	33.850	140.940.320		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				71.712.000		75.297.600		79.062.480		83.015.604		87.166.384		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	65.185	65.195	71.712.000	65.195	75.297.600	65.195	79.062.480	65.195	83.015.604	65.195	87.166.384		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				51.529.600		54.106.080		56.811.384		59.651.953		62.634.551		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.809	50.819	51.529.600	50.819	54.106.080	50.819	56.811.384	50.819	59.651.953	50.819	62.634.551		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				58.837.300		61.779.165		64.868.123		68.111.529		71.517.106		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.114	1.134	58.837.300	1.134	61.779.165	1.134	64.868.123	1.134	68.111.529	1.134	71.517.106		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				31.351.300		32.918.865		34.564.808		36.293.049		38.107.701		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.084	1.125	31.351.300	1.125	32.918.865	1.125	34.564.808	1.125	36.293.049	1.125	38.107.701		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				55.135.940		57.892.737		60.787.374		63.826.743		67.018.080		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11.561	11.571	55.135.940	11.571	57.892.737	11.571	60.787.374	11.571	63.826.743	11.571	67.018.080		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				40.566.290		42.594.605		44.724.335		46.960.551		49.308.579		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12.708	12.608	40.566.290	12.608	42.594.605	12.608	44.724.335	12.608	46.960.551	12.608	49.308.579		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				167.079.700		175.433.685		184.205.369		193.415.638		203.086.420		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	167.079.700	12	175.433.685	12	184.205.369	12	193.415.638	12	203.086.420		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				167.079.700		175.433.685		184.205.369		193.415.638		203.086.420		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	12	167.079.700	12	175.433.685	12	184.205.369	12	193.415.638	12	203.086.420		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				89.141.802		93.598.892		98.278.837		103.192.779		108.352.417		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12	12	89.141.802	12	93.598.892	12	98.278.837	12	103.192.779	12	108.352.417		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				194.100.498		203.805.523		213.995.799		224.695.589		235.930.368		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12	12	194.100.498	12	203.805.523	12	213.995.799	12	224.695.589	12	235.930.368		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				266.880.400		280.224.420		294.235.641		308.947.423		324.394.794		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	12	266.880.400	12	280.224.420	12	294.235.641	12	308.947.423	12	324.394.794		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				65.880.682		62.743.507		59.755.721		56.910.210		54.200.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12	12	65.880.682	12	62.743.507	12	59.755.721	12	56.910.210	12	54.200.200		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				205.267.500		215.530.875		226.307.419		237.622.790		249.503.929		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	205.267.500	12	215.530.875	12	226.307.419	12	237.622.790	12	249.503.929		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				370.342.000		388.859.100		408.302.055		428.717.158		450.153.016		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	370.342.000	12	388.859.100	12	408.302.055	12	428.717.158	12	450.153.016		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				35.163.140.857		35.163.140.857		35.163.140.857		35.163.140.857		35.163.140.857		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	35.163.140.857	12	35.163.140.857	12	35.163.140.857	12	35.163.140.857	12	35.163.140.857		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				117.375.000		123.243.750		129.405.938		135.876.234		142.670.046		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	117.375.000	1	123.243.750	1	129.405.938	1	135.876.234	1	142.670.046		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				187.841.118		197.233.174		207.094.833		217.449.574		228.322.053		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	12	12	187.841.118	12	197.233.174	12	207.094.833	12	217.449.574	12	228.322.053		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				492.129.635		516.736.117		542.572.923		569.701.569		598.186.647		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12	12	492.129.635	12	516.736.117	12	542.572.923	12	569.701.569	12	598.186.647		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				757.774.841		79.566.358		83.544.676		87.721.910		92.108.005		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	12	12	757.774.841	12	79.566.358	12	83.544.676	12	87.721.910	12	92.108.005		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				80.000.000		84.000.000		88.200.000		92.610.000		97.240.500		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0	1	80.000.000	1	84.000.000	1	88.200.000	1	92.610.000	1	97.240.500		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				33.058.990		34.711.940		36.447.536		38.269.913		40.183.409		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	12	12	33.058.990	12	34.711.940	12	36.447.536	12	38.269.913	12	40.183.409		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				19.818.740		20.809.677		21.850.161		22.942.669		24.089.802		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	12	12	19.818.740	12	20.809.677	12	21.850.161	12	22.942.669	12	24.089.802		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				65.284.500		68.548.725		71.976.161		75.574.969		79.353.718		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	12	12	65.284.500	12	68.548.725	12	71.976.161	12	75.574.969	12	79.353.718		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				20.746.825		21.784.166		22.873.375		24.017.043		25.217.895		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12	12	20.746.825	12	21.784.166	12	22.873.375	12	24.017.043	12	25.217.895		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				242.548.700		254.676.135		267.409.942		280.780.439		294.819.461		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12	12	242.548.700	12	254.676.135	12	267.409.942	12	280.780.439	12	294.819.461		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				28.514.250		29.939.963		31.436.961		33.008.809		34.659.249		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	12	12	28.514.250	12	29.939.963	12	31.436.961	12	33.008.809	12	34.659.249		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				71.915.706		75.511.491		79.287.066		83.251.419		87.413.990		
output 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	4	71.915.706	4	75.511.491	4	79.287.066	4	83.251.419	4	87.413.990		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				71.915.706		75.511.491		79.287.066		83.251.419		87.413.990		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	4	71.915.706	4	75.511.491	4	79.287.066	4	83.251.419	4	87.413.990		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.846.846		158.389.188		166.308.648		174.624.080		183.355.284		
output 1	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	21	21	150.846.846	21	158.389.188	21	166.308.648	21	174.624.080	21	183.355.284		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	21	21				21		21					
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				80.362.646		84.380.778		88.599.817		93.029.808		97.681.298		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	21	21	80.362.646	21	84.380.778	21	88.599.817	21	93.029.808	21	97.681.298		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				70.484.200		74.008.410		77.708.831		81.594.272		85.673.986				
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	21	21	70.484.200	21	74.008.410	21	77.708.831	21	81.594.272	21	85.673.986				
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.340.709.220		1.407.744.682		1.478.131.916		1.552.038.512		1.629.640.436				
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kesehatan	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya (%)	60	70	1.340.709.220	75	1.407.744.682	80	1.478.131.916	85	1.552.038.512	90	1.629.640.436	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN			
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	5,2	5,3				5,4				5,5					
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	12	22				30				40				60	
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar (%)	63	71				76				81				86	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				105.936.020		111.232.821		116.794.462		122.634.185		128.765.894				
Meningkatnya pemberian izin praktek tenaga keehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	21	21	105.936.020	21	111.232.821	21	116.794.462	21	122.634.185	21	128.765.894				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	21	21				21				21					
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				42.518.400		44.644.320		46.876.536		49.220.363		51.681.381				
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	21	21	42.518.400	21	44.644.320	21	46.876.536	21	49.220.363	21	51.681.381				
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				63.417.620		66.588.501		69.917.926		73.413.822		77.084.513				
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	21	21	63.417.620	21	66.588.501	21	69.917.926	21	73.413.822	21	77.084.513				
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				235.329.300		247.095.766		259.450.554		272.423.082		286.044.235				
Meningkatnya Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	21	21	235.329.300	21	247.095.766	21	259.450.554	21	272.423.082	21	286.044.235				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	36	36				36				36					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	21	21				21				21					
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				17.430.000		18.301.500		19.216.575		20.177.404		21.186.274				
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	21	21	17.430.000	21	18.301.500	21	19.216.575	21	20.177.404	21	21.186.274				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				173.314.250		181.979.963		191.078.961		200.632.909		210.664.554		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	36	36	173.314.250	36	181.979.963	36	191.078.961	36	200.632.909	36	210.664.554		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				44.585.050		46.814.303		49.155.018		51.612.769		54.193.407		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	21	21	44.585.050	21	46.814.303	21	49.155.018	21	51.612.769	21	54.193.407		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				999.443.900		1.049.416.095		1.101.886.900		1.156.981.245		1.214.830.307		
Meningkatnya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK Tingkat daerah kab/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	36	36	999.443.900	36	1.049.416.095	36	1.101.886.900	36	1.156.981.245	36	1.214.830.307		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				999.443.900		1.049.416.095		1.101.886.900		1.156.981.245		1.214.830.307		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	36	36	999.443.900	36	1.049.416.095	36	1.101.886.900	36	1.156.981.245	36	1.214.830.307		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				85.498.199		89.773.109		94.261.765		98.974.853		103.923.595		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Parsentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	40	50	85.498.199	55	89.773.109	60	94.261.765	65	98.974.853	75	103.923.595	1.02.0.00.0.00.01. 0000 - DINAS KESEHATAN	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	25	35		40		45		60		55			
	Persentase pangan industri rumah tanggaan aman dan bermutu (%)	40	50		55		60		65		70			
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	50	60		65		70		75		80			
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	10	15		20		25		30		40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				44.412.999		46.633.649		48.965.331		51.413.598		53.984.278		
Meningkatnya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehtan dan optikal, usaha mikro obat tradisional(UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	21	21	44.412.999	21	46.633.649	21	48.965.331	21	51.413.598	21	53.984.278		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				44.412.999		46.633.649		48.965.331		51.413.598		53.984.278		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	21	21	44.412.999	21	46.633.649	21	48.965.331	21	51.413.598	21	53.984.278		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				31.500.200		33.075.210		34.728.971		36.465.419		38.288.690		
Meningkatnya penerbitn sertifikat produksi pangan insdustri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	21	21	31.500.200	21	33.075.210	21	34.728.971	21	36.465.419	21	38.288.690		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				31.500.200		33.075.210		34.728.971		36.465.419		38.288.690		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	21	21	31.500.200	21	33.075.210	21	34.728.971	21	36.465.419	21	38.288.690		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				9.585.000		10.064.250		10.567.463		11.095.836		11.650.627		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya sertifikat laik sehat higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	21	21	9.585.000	21	10.064.250	21	10.567.463	21	11.095.836	21	11.650.627				
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				9.585.000		10.064.250		10.567.463		11.095.836		11.650.627				
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	21	21	9.585.000	21	10.064.250	21	10.567.463	21	11.095.836	21	11.650.627				
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				0		0		0		0		0				
Meningkatnya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada produksi dan produk makanan dan minuman insdustri rumah tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	55	65	0	68	0	68	0	68	0	70	0				
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	55	65	0	68	0	68	0	68	0	70	0				
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				341.802.697		355.725.432		370.054.817		385.694.116		401.811.421				
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Parsentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	17,63	45	341.802.697	50	355.725.432	65	370.054.817	70	385.694.116	75	401.811.421	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN			
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				24.621.750		25.852.838		27.145.479		28.502.753		29.927.891				
Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	21	21	24.621.750	21	25.852.838	21	27.145.479	21	28.502.753	21	29.927.891				
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				24.621.750		25.852.838		27.145.479		28.502.753		29.927.891				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	21	21	24.621.750	21	25.852.838	21	27.145.479	21	28.502.753	21	29.927.891		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45.244.150		47.506.358		49.881.676		52.375.759		54.994.547		
Jumlah Nagari melaksanakan Upaya perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	100	100	45.244.150	100	47.506.358	100	49.881.676	100	52.375.759	100	54.994.547		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	21	21		21		21		21		21			
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				26.614.600		27.945.330		29.342.597		30.809.726		32.350.213		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	21	21	26.614.600	21	27.945.330	21	29.342.597	21	30.809.726	21	32.350.213		
1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				18.629.550		19.561.028		20.539.079		21.566.033		22.644.334		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	100	100	18.629.550	100	19.561.028	100	20.539.079	100	21.566.033	100	22.644.334		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				83.054.900		87.207.645		91.568.027		96.146.429		100.953.750		
Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	21	21	83.054.900	21	87.207.645	21	91.568.027	21	96.146.429	21	100.953.750		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				83.054.900		87.207.645		91.568.027		96.146.429		100.953.750		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	21	21	83.054.900	21	87.207.645	21	91.568.027	21	96.146.429	21	100.953.750		

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.900.697.000		9.900.697.000		9.900.697.000		9.900.697.000		9.900.697.000		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	80	85	1.050.000.000	85	1.050.000.000	90	1.050.000.000	90	1.050.000.000	95	1.050.000.000	1.02.000.000.01.00 00 - DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000		
2.14.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	10,4	9,4	300.000.000	9,1	300.000.000	8,8	300.000.000	8,6	300.000.000	8,4	300.000.000	1.02.000.000.01.00 00 - DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	TFR (Angka Kelahiran Total) (%)	2,48	2,44		2,42		2,4		2,39		2,37			
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	59,49	62,2		63,5		64,7		65,9		67			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000					
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1				1				1					1	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	1				1				1					1	
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000					
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000					
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000					
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000					

2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				259.800.000		259.800.000		259.800.000		259.800.000		259.800.000		
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	259.800.000	1	259.800.000	1	259.800.000	1	259.800.000	1	259.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				109.200.000		109.200.000		109.200.000		109.200.000		109.200.000		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	109.200.000	1	109.200.000	1	109.200.000	1	109.200.000	1	109.200.000		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		

2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	15	15	600.000	15	600.000	15	600.000	15	600.000	15	600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000		6.067.097.000		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting (%)	97,98	98,24	6.067.097.000	98,82	6.067.097.000	98,97	6.067.097.000	99,01	6.067.097.000	99,31	6.067.097.000	1.02.000.000.01.00 00 - DINAS KESEHATAN DAN PPKB	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (%)	40,16	40,31		41,23		41,76		42,03		42,68			
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	97,3	98		98,5		100		100		100			
	Persentase Kebutuhan ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	33,79	33,75		33,73		33,71		33,69		33,67			
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modren (%)	83,9	86,1		87,1		88,1		88,9		89,7			
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) (%)	66,86	66,9		66,92		66,94		66,96		66,98			
	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan (%)	94,2	95,1		95,3		95,9		96,3		96,6			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.639.500.000		1.639.500.000		1.639.500.000		1.639.500.000		1.639.500.000		
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk (Laporan)	1	1	1.639.500.000	1	1.639.500.000	1	1.639.500.000	1	1.639.500.000	1	1.639.500.000		

	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	4	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		

Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	4	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				1.014.000.000		1.014.000.000		1.014.000.000		1.014.000.000		1.014.000.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1	1.014.000.000	1	1.014.000.000	1	1.014.000.000	1	1.014.000.000	1	1.014.000.000		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.449.300.000		1.449.300.000		1.449.300.000		1.449.300.000		1.449.300.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	1.449.300.000	1	1.449.300.000	1	1.449.300.000	1	1.449.300.000	1	1.449.300.000		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	662	662		662		662		662		662			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	662	662	200.000	662	200.000	662	200.000	662	200.000	662	200.000		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1.448.800.000		1.448.800.000		1.448.800.000		1.448.800.000		1.448.800.000		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	5	5	1.448.800.000	5	1.448.800.000	5	1.448.800.000	5	1.448.800.000	5	1.448.800.000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	3	3	975.000.000	3	975.000.000	3	975.000.000	3	975.000.000	3	975.000.000		
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1				1				1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.250	2.250				2.250				2.250			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1				1				1			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		

Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	28.800.000	1	28.800.000	1	28.800.000	1	28.800.000	1	28.800.000		
---	--	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				879.816.000		879.816.000		879.816.000		879.816.000		879.816.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.250	2.250	879.816.000	2.250	879.816.000	2.250	879.816.000	2.250	879.816.000	2.250	879.816.000		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarlngnya				66.284.000		66.284.000		66.284.000		66.284.000		66.284.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarlngnya (Laporan)	1	1	66.284.000	1	66.284.000	1	66.284.000	1	66.284.000	1	66.284.000		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	3	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2.003.297.000		2.003.297.000		2.003.297.000		2.003.297.000		2.003.297.000		

Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	15	15	2.003.297.000	15	2.003.297.000	15	2.003.297.000	15	2.003.297.000	15	2.003.297.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	15	15		15		15		15		15			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.001.000.000		1.001.000.000		1.001.000.000		1.001.000.000		1.001.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	15	15	1.001.000.000	15	1.001.000.000	15	1.001.000.000	15	1.001.000.000	15	1.001.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	15	15	100.000	15	100.000	15	100.000	15	100.000	15	100.000		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1.002.197.000		1.002.197.000		1.002.197.000		1.002.197.000		1.002.197.000		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	1.002.197.000	1	1.002.197.000	1	1.002.197.000	1	1.002.197.000	1	1.002.197.000		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000		2.483.600.000		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (Indeks)	80,1	83,4	2.483.600.000	84,8	2.483.600.000	86,1	2.483.600.000	87,2	2.483.600.000	88,3	2.483.600.000	1.02.000.000.01.00 00 - DINAS KESEHATAN DAN	

	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	45,25	45,75		50		50,25		50,5		50,75		PPKB	
	Indeks Lansia Berdaya (Angka)	59,5	61		61,7		62,4		63		63,7			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.478.600.000		2.478.600.000		2.478.600.000		2.478.600.000		2.478.600.000		
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	662	662	2.478.600.000	662	2.478.600.000	662	2.478.600.000	662	2.478.600.000	662	2.478.600.000		
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	58.523	58.523		58.523		58.523		58.523		58.523			
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				2.248.600.000		2.248.600.000		2.248.600.000		2.248.600.000		2.248.600.000		

Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	58.523	58.523	2.248.600.000	58.523	2.248.600.000	58.523	2.248.600.000	58.523	2.248.600.000	58.523	2.248.600.000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	662	662	100.000.000	662	100.000.000	662	100.000.000	662	100.000.000	662	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)
		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
		1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
		1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(02)	(03)	(04)	(05)
		1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
		1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
		1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
		1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
		1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kesehatan	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
		1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga;	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,343	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5	
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	Angka	125	111	97	97	83	83	100	
3	Prevalensi Stunting	%	27	24	23	22	21	20	20	
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (Treatment Coverage)	%	57	95	95	95	95	95	95	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	92,25	93	94	95	96	97	98	
6	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	17,63	40	45	50	65	70	75	
7	Persentase Cakupanediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Masyarakat	%	40	45	50	55	60	65	75	
II ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	91	91	91	91	91	91	100	
2	Nilai SAKIP	Angka	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	
3	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya	%	60	65	70	75	80	85	90	
4	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	91	91	91	91	91	100	
III ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,81	81	81	82	82	83	84	
IV INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Angka	0,09	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1	
8	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	10	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	
11	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	91	91	91	91	91	91	
14	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	

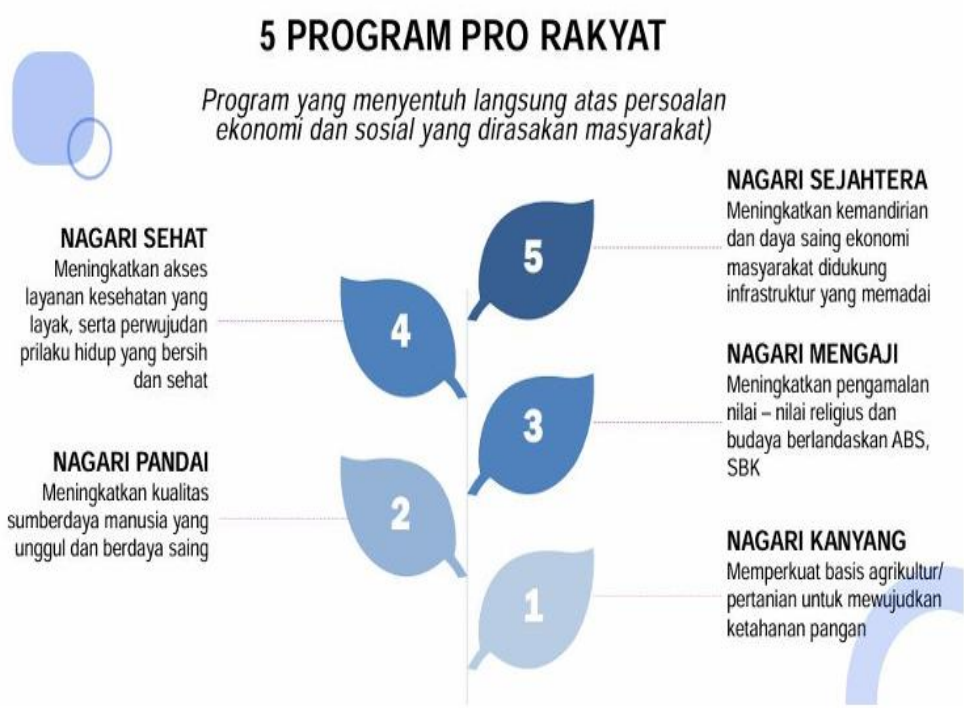
TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,343	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5	
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	Angka	125	122	109	97	86	77	75	
3	Prevalensi Stunting	%	7	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (Treatment Coverage)	%	57	95	95	95	95	95	95	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	92,25	93	94	95	96	97	98	
6	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	17,63	40	45	50	65	70	75	
7	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	40	45	50	55	60	65	75	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,81	81	81	82	82	83	84	
2	Persentase Named Nakes yang ditingkatkan Mutunya	%	60	65	70	75	80	85	90	
3	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	91	91	91	91	91	100	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,81	81	81	82	82	83	84	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Angka	0,09	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1	
8	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	10	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	
11	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	91	91	91	91	91	91	

14	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.3 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut :



Tabel 4.4

Program Pro Rakyat Tahun 2025-2029

Tujuan 2.1. Meningkatkan Sumber Manusia yang Unggul			
Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Pro Rakyat
Sasaran 2.1.4 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Berobat gratis 2. Kebijakan berobat menggunakan KTP 2. satu nagari satu fasilitas Kesehatan 3. satu nagari satu tempat penyimpanan sampah sementara 4. Kampung bebas narkoba 5. Fasilitas olahraga di nagari 6. Pengelolaan persampahan menjadi sumber daya ekonomi dan energi
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	

Program pro rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah nagari Sehat, dapat dilihat di tabel4.4:

Tabel 4.4															
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat															
NO	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						program/kegiatan/SubKegiatan	Anggaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nagari Sehat														
	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN														
1	Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi masyarakat miskin & tidak mampu	Pembayaran Iuran Premi JKN BPBU & BP Pemda (JKSS) untuk Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu (JKN Gratis dari Pemda)	94.175 Jiwa	99.535 jiwa	105.535 jiwa	111.535 jiwa	117.535 jiwa	123.535 jiwa	PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT / Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.163.140.857	37.788.136.000	40.005.736.000	42.223.336.000	44.440.936.000	46.658.536.000
2	Pelayanan kesehatan pada kondisi-kondisi Khusus	Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada kondisi-kondisi khusus, antara lain: pada Event-Event Daerah, Upacara Hari Besar Nasional, Pelayanan kesehatan Mudik Lebaran Idul Fitri, dan Nataru serta Pelayanan Kesehatan pada saat bencana dan KLB	50 event	55 event	60 event	65 event	70 event	75 event	SUB KEGIATAN : Operasional fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	225.500.000	235.000.000	240.000.000	250.000.000	260.000.000	270.000.000
3	Pelayanan Kesehatan 24 Jam kepada masyarakat untuk kasus-kasus emergency (darurat)	Kegiatan PSC-119 di Dinas Kesehatan, 21 Puskesmas dan 2 RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	1 Posko PSC Dinkes, 21 IGD Puskesmas & 2 IGD RSUD	SUB KEGIATAN: Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	70.484.200	125.000.000	175.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000
4	Pemeliharaan & Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan secara berkesinambungan	Pelaksanaan Akreditasi, Registrasi dan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	21 Puskesmas, 2 RSUD, 2 RS Swasta, 9 Klinik	SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, SUB KEGIATAN: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	156.140.130	200.000.000	250.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemeliharaan & Kalibrasi Alat-lat Kesehatan	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	21 Puskesmas dan Jaringan, 2 RSUD	SUB KEGIATAN: Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, SUB KEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.047.749.141	9.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000	18.000.000.000	21.000.000.000
	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT														
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin	Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di lokasi dekat RSUD M zein Painan dan makan minum pendamping pasien	100 pasien/pendamping pasien	110 pasien/pendamping pasien	120 pasien/pendamping pasien	130 pasien/pendamping pasien	140 pasien/pendamping pasien	150 pasien/pendamping pasien	Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan :Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota, Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	167.400.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000
2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kegiatan Germas Topik Prioritas	8 Kegiatan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan :Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota, Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	220.000.000	240.000.000	260.000.000	280.000.000	300.000.000

NO	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						program/kegiatan/SubKegiatan	Anggaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit														
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tempat Pengelolaan Pangan dan Sarana Air Minum Komunal, Pendampingan Nagari STBM melalui pemucuan 5 Pilar STBM di Tingkat Nagari (SBS, CTPS, Pengelolaan Air Minum dan Makan Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga)	33 Nagari, 3 Kecamatan, 43.679 KK	63 Nagari, 5 kecamatan, 62.399 KK	93 Nagari, 8 Kecamatan, 74.879 KK	123 Nagari, 10 Kecamatan, 87.359 KK	143 Nagari, 13 Kecamatan, 93.599 KK	182 Nagari, 15 Kecamatan, KK 99.839 KK	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota, Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	194.100.498	225.156.578	261.181.630	302.970.691	333.267.760	403.253.990
2	Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat	Penguatan Kelembagaan baik tingkat Kecamatan maupun Nagari (Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Nagari, Penyusunan Renja, Ketersediaan Sekretariat dan Penganggaran dan Keaktifan anggota yang diibuktikan dengan dokumentasi kegiatan rapat)	33 Nagari, 3 Kecamatan	63 Nagari, 5 kecamatan	93 Nagari, 8 Kecamatan	123 Nagari, 10 Kecamatan	143 Nagari, 13 Kecamatan	182 Nagari, 15 Kecamatan	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota, Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat	187.841.118	217.895.697	252.759.008	293.200.450	322.520.495	390.249.799

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupatn Pesisir Selatan tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.5 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2.1 Indikator Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN										
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
2.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,343	0,4	0,43	0,44	0,46	0,48	0,5	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,81	81	81	82	82	83	84	
4.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	Angka	125	111	97	97	83	83	100	
5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	91	91	91	91	91	91	100	
6.	Prevalensi Stunting	%	27	24	23	22	21	20	20	
7.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (Treatment Coverage)	%	57	95	95	95	95	95	95	
8.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	92,25	93	94	95	96	97	98	
8.	Persentase PUS Yang ber-KB	%	61,47	62,14	52,89	63,00	63,15	63,30	63,45	

1.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persentase	0,09	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Pesentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Angka Kematian bayi (per 1.000 Kelahiran HiduP)	Angka	10	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	

Tabel 4.7
Indikator dan Target kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Target Indikator	satuan	Baseline (2024)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	persentase	83,7	84	85	86	88	90	92
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) (Persentase Ibu Hamil Anemia Ringan yang Mendapatkan terapi TTD	persentase		40	50	60	70	80	90
3	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	persentase	74	80	82	85	88	90	92
4	Keluarga Berencana dan jarak kelahiran (Persentase Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP)	persentase		57	60	65	70	75	80
5	Praktik Inisiasi Menyusui Dini (Persentase Inisiasi Menyusui Dini)	persentase	58	50	55	60	65	75	80
6	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif (Persentase bayi Usia Kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif)	persentase	68,6	73	76	79	82	85	88
7	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan (Persentase anak Usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI)	persentase	60,9	73	76	79	82	85	88
8	Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun (Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif)	persentase	55,5	61	64	67	70	73	76
9	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk (Persentase balita gizi buruk mendapatkan tata laksana)	persentase	87,25	91	92	93	94	95	96
10	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan)	persentase	24	50	55	60	65	70	75
11	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (Persentase balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan)	persentase	71,29	65	70	75	80	85	90
12	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap (Anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi rutin Lengkap)	persentase	75%	80%	85%	90%	93%	95%	97%
13	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	persentase	100	100	100	100	100	100	100
14	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA	persentase	100	100	100	100	100	100	100
15	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi (Persentase balita bermasalah gizi mendapatkan Penanganan)	persentase		65	70	75	80	85	90
16	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan MT dan mengalami perbaikan status gizi	persentase		65	68	71	76	81	86
17	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	persentase	100	100	100	100	100	100	100
18	Penemuan kasus pneumonia balita	persentase	33%	36	39	42	45	48	51
19	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA (Anak usia 24-59 bulan mendapatn obat cacing (POPM)	persentase	100	100	100	100	100	100	100
20	Remaja putri yang Konsumsi TTD	persentase	76,42	65	67	70	75	80	85
21	Remaja putri yang diskriming anemia	persentase	77,38	75	77	80	83	85	88
22	Pemeriksaan kesehatan pranikah (Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan Skrining kesehatan)	persentase	49,2	50	55	60	65	70	75
23									
24									

NO.	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Positif	%	66,86	66,88	66,9	66,92	66,94	66,96	66,98	
2.	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Positif	%	45,25	45,5	45,75	50	50,25	50,5	50,75	
3.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Negatif	%	2,48	2,46	2,44	2,42	2,4	2,39	2,37	
4.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	Negatif	%	10,4	9,9	9,4	9,1	8,8	8,6	8,4	
5.	Indeks Lansia Berdaya	Positif	Angka	59,5	60,3	61	61,7	62,4	63	63,7	
6.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Negatif	%	33,79	33,77	33,75	33,73	33,71	33,69	33,67	
7.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Positif	Indeks	80,1	81,8	83,4	84,8	86,1	87,2	88,3	
8.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modren	Positif	%	83,9	85	86,1	87,1	88,1	88,9	89,7	
9.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	Positif	%	40,16	40,27	40,31	41,23	41,76	42,03	42,68	
10.	Calon Pengantin Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan	Positif	%	94,2	94,7	95,1	95,3	95,9	96,3	96,6	
11.	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting	Positif	%	97,98	98,17	98,24	98,82	98,97	99,01	99,31	
12.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Positif	%	97,3	97,7	98	98,5	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 juga merupakan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2030. Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan Masyarakat Pesisir Selatan . Disamping itu Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkronisasi antara satu dengan lainnya di dalam satu Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: ***“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pelayanan kesehatan kepada masyarakat”***.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berisikan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga

pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Output dari Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program dan Kegiatan tahun 2025-2029 serta tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan pelaksanaan aplikatif dari Renstra tersebut yang bertujuan untuk perencanaan anggaran pembangunan kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang tugas pokok dan fungsi serta sasaran prioritas program pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara signifikan.

